

**ANALISIS PERBEDAAN KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN
SESUDAH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**Haviz Taufik, S.E., M.Acc., Ak., CA.
Dosen Program Sarjana Akuntansi Universitas Adiwangsa Jambi
Email : haviz.jbi@gmail.com**

ABSTRACT

The study this aims to analyze how the performance of local government district of West Tanjung Jabung before and after implementation of performance-based budgeting. Measuring instrument used is a financial ratio analysis area consists of: self-sufficiency ratio, the dependency ratio, the degree of decentralization, effectiveness and efficiency of local revenue ratio, the ratio of the effectiveness and efficiency of local tax contribution and the degree of public enterprises. The financial ratios have an important role in determining whether or not the local government performance.

The results show independence region ratio decreases, the dependency ratio increases, the degree of decentralization decreases, the ratio of effectiveness and efficiency of local tax revenue decline merngalami. Based on the analysis, it can be concluded that the performance of the District government of West Tanjung Jabung after the application of performance-based budget is declining.

Keywords: Government Performance, Financial Ratios, Performance Based Budgeting.

Pendahuluan

Proses reformasi dan demokratisasi yang terjadi di Indonesia mendorong adanya reformasi manajemen keuangan daerah. Reformasi keuangan daerah diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket Undang-Undang Otonomi Daerah yang selanjutnya akan disingkat menjadi UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan berlakunya kedua Undang-Undang tersebut, maka diberikan kewenangan dan tanggungjawab yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah untuk mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang lebih efisien, efektif, demokratis dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan masyarakat untuk kesejahteraan dan kemajuan daerah. Tuntutan ini secara implisit merupakan tantangan bagi pemerintah daerah untuk menata kembali manajemen keuangannya secara lebih baik mulai dari perumusan perencanaan sampai kepada tata kelola keuangan dan administratif.

Kebijakan otonomi daerah memberikan konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan

kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkisenambungan. Munculnya berbagai persoalan di daerah baik ditingkat aparat pemerintah daerah maupun masyarakat, seperti korupsi, angka kemiskinan dan pengangguran semakin melambung, serta berbagai persoalan daerah lainnya menunjukkan kesalahan dalam implementasi kebijakan otonomi daerah, dimana persoalan tersebut tidak terlepas dari kinerja pemerintah daerah dalam mengatur keuangan daerah, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Upaya menciptakan kinerja pemerintahan yang baik sebagai reformasi dalam perubahan pola manajemen keuangan pemerintah daerah telah diupayakan pemerintah dengan dikelurkannya seperangkat regulasi yang mengatur penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang mengganti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002. Dalam reformasi anggaran tersebut, proses penyusunan APBD diharapkan

menjadi lebih partisipatif. Hal tersebut sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 yang kemudian telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 59 Tahun 2007 tentang Keuangan Negara yang menetapkan penerapan anggaran berbasis kinerja pada APBD.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2006 tentang pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam tahun anggaran 2004 telah memulai pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan telah menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Sebelum diberlakukannya pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja, pendekatan penganggaran yang digunakan adalah pendekatan anggaran tradisional atau *line item*. Penyusunan dengan cara ini tidak didasarkan pada analisis rangkaian kegiatan yang harus dihubungkan dengan tujuan yang telah ditentukan, namun lebih menitikberatkan pada kebutuhan untuk belanja/pengeluaran. Sistem pertanggungjawaban tidak diperiksa dan diteliti apakah dana tersebut telah digunakan secara efektif dan efisien atau tidak. Tolak ukur

keberhasilan hanya ditunjukkan dengan adanya keseimbangan anggaran antara pendapatan dan belanja. Jika anggaran tersebut defisit atau surplus berarti pelaksanaan anggaran gagal.

Penelitian tentang analisis perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan sesudah penerapan anggaran berbasis kinerja sudah pernah dilakukan, penelitian tersebut dilakukan oleh Hijrani Putri Lubis (2009) pada daerah Kabupaten Deli serdang, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Sedangkan penelitian yang sama dilakukan juga oleh Shinta Unjaswati Ekawarna (2006) pada daerah Kabupaten Muaro Jambi dimana hasil peneltian menunjukkan bahwa kemandirian daerah Kabupaten Muaro Jambi dalam mencukupi kebutuhan biaya untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat pada tahun anggaran 2003-2006 masih rendah. Selain itu rasio efektivitas tinggi dan efisiensi rendah dan rasio pertumbuhan tinggi. Namun rasio aktivitas rendah, sehingga kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi disimpulkan belum baik.

Pada peneliti kali ini peneliti ingin menjadikan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai objek penelitian karena daerah tersebut sudah menerapkan anggaran berbasis kinerja lebih dahulu dalam penyusunan anggarannya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sebelum diterapkannya anggaran berbasis kinerja?
2. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sesudah diterapkannya anggaran berbasis kinerja?
3. Bagaimana perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebelum dan sesudah penerapan anggaran berbasis kinerja?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sebelum diterapkannya anggaran berbasis kinerja.
2. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah

daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sesudah diterapkannya anggaran berbasis kinerja.

3. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebelum dan sesudah penerapan anggaran berbasis kinerja.

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti, Untuk menemukan bukti empiris tentang pengaruh sebelum dan sesudah penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai tambahan bahan referensi dalam menganalisis kinerja keuangannya sebelum dan sesudah di berlakukan anggaran berbasis kinerja serta upaya dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi pendapatan asli daerah (PAD).
3. Bagi kalangan akademisi, diharapkan dapat menjadi rujukan, referensi maupun pembanding untuk penelitian selanjutnya mengenai

pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja keuangan pemerintah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Landasan Teori

Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan suatu alat untuk perencanaan dan pengawasan operasi keuntungan dalam suatu organisasi laba dimana tingkat formalitas suatu anggaran tergantung besar kecilnya organisasi. Pada dasarnya apapun bentuk organisasi pasti akan melakukan penganggaran yang pada dasarnya merupakan setak biru bagi pencapaian visi misinya. Anggaran adalah salah satu mekanisme yang akan menjamin terciptanya disiplin pengambilan keputusan.

Nordiawan dalam Freeman dkk (2007:19), menyebutkan anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran financial. Sedangkan menurut Halim (2007:142), memberikan defenisi anggaran adalah suatu rencana pekerjaan yang pada satu pihak mengandung jumlah pengeluaran yang setinggi-tingginya yang mungkin diperlukan untuk membiayai kepentingan Negara pada suatu masa lampau, dan pihak lain perkiraan pendapatan yang mungkin akan dapat diterima dalam masa tersebut.

Menurut Bastian (2006:163), anggaran adalah paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Menurut Mardiasmo (2004:62), anggaran pemerintah merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk dapat mendanai rencana tersebut (pendapatan). Tanjung (2008:81), menyebutkan anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode.

Fungsi Anggaran

Beberapa fungsi anggaran menurut Nordiawan (2007:20), fungsi anggaran adalah sebagai berikut :

1. Anggaran sebagai alat perencanaan
Dengan adanya anggaran, organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan akan dibuat.
2. Anggaran sebagai alat pengendalian
Dengan adanya anggaran, organisasi sektor publik dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar

- atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya.
3. Anggaran sebagai alat kebijakan
Melalui anggaran, organisasi sektor publik dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu.
 4. Anggaran sebagai alat politik
Dalam organisasi sektor publik, komitmen pengelolaan dalam melaksanakan program – program yang telah dijanjikan dapat dilihat melalui anggaran.
 5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi
Melalui dokumen anggaran yang komprehensif, sebagai bagian, unit kerja, atau departemen yang merupakan sub organisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan juga apa yang akan dilakukan oleh bagian/unit kerja lainnya.
 6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja
 7. Anggaran adalah suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu bagian/unit kerja telah memenuhi target, baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya.
 8. Anggaran sebagai alat motivasi
Anggaran dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan menjadikannya nilai – nilai nominal yang tercantum sebagai target

pencapaian. Dengan catatan, anggaran akan menjadi alat motivasi yang baik jika memenuhi sifat “menantang tapi masih mungkin untuk di capai”.

Anggaran Berbasis Kinerja

Seiring dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap transparansi penganggaran belanja publik maka diperkenalkan sistem penganggaran yang berbasis kinerja sebagai pengganti sistem penganggaran lama dengan *system line budgeting*. Secara teori anggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang menghubungkan Anggaran Negara (pengeluaran Negara) dengan hasil yang diinginkan sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatannya.

Menurut Bastian (2006:171), anggaran kinerja adalah perencanaan kinerja tahunan secara terintegrasi yang menunjukkan hubungan antara tingkat pendanaan program dan hasil yang diinginkan program tersebut. Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan.

Manfaat yang bisa didapatkan dari penerapan anggaran berbasis kinerja khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu terciptanya pelaksanaan kegiatan pemerintah yang transparan,

kemudian juga memudahkan dalam mengkomunikasikan strategi kedepan secara lebih baik, untuk mengukur kinerja keuangan dan non keuangan secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi, kemudian untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi, menyediakan sarana pembelajaran pegawai dan memperbaiki kinerja di periode – periode berikutnya.

Anggaran berbasis kinerja dirancang untuk menciptakan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pemanfaatan anggaran belanja publik dengan *output* dan *outcome* yang jelas sesuai dengan prioritas nasional sehingga semua anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat luas. Penerapan penganggaran berdasarkan kinerja juga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat dampak dari peningkatan pelayanan kepada publik

Anggaran berbasis kinerja memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut sehingga prinsip – prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dapat dicapai. Kunci pokok untuk memahami anggaran berbasis kinerja adalah pada kata “kinerja” untuk mendukung sistem penganggaran

berbasis kinerja yang menetapkan kinerja sebagai tujuan utamanya maka diperlukan alat ukur kinerja yang jelas dan transparan berupa indikator kinerja. Selain indikator kinerja juga diperlukan adanya sasaran yang jelas agar kinerja dapat diukur dan dibandingkan sehingga selanjutnya dapat dinilai efisiensi dan efektivitas dari pekerjaan yang dilaksanakan serta dana yang telah dikeluarkan untuk mencapai output/kinerja yang telah ditetapkan.

Prinsip-prinsip Anggaran Berbasis Kinerja

Secara umum prinsip – prinsip anggaran berbasis kinerja didasarkan pada konsep *value for money* (ekonomis, efisiensi dan efektivitas) dan prinsip *good corporate governance*, termasuk adanya pertanggungjawaban para pengambil keputusan atas penggunaan uang yang dianggarkan untuk mencapai tujuan, sasaran, dan indikator yang telah ditetapkan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Tanjung (2008:81), anggaran pendapatan dan belanja daerah yang kemudian disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat, Sedangkan definisi APBD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan

keuangan daerah, yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Kinerja

Dalam organisasi sektor publik, setelah adanya operasional anggaran, langkah selanjutnya adalah pengukuran kinerja untuk menilai prestasi dan akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Menurut Mardiasmo (2004:110), Akuntabilitas merupakan salah satu ciri dari terapan *good governance* bukan hanya sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Menurut Bastian (2006:97), kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.

Tujuan Kinerja

Menurut Bastian (2006:275), Tujuan dari kinerja antara lain :

1. Meningkatkan prestasi kerja staf, baik secara individu maupun dalam kelompok.
2. Merangsang minat dalam pengembangan pribadi dengan meningkatkan hasil kerja melalui prestasi pribadi.

Memberikan kesempatan kepada staf untuk menyampaikan perasaannya

tentang pekerjaan, sehingga terbuka jalur komunikasi dua arah antara pimpinan dan staf.

Kinerja Keuangan Pemerintah

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan pemerintah daerah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Jika dibandingkan dengan neraca, LRA menduduki prioritas yang lebih penting dan LRA ini merupakan jenis laporan keuangan yang paling dahulu dihasilkan. Dari LRA inilah pembaca laporan dapat membuat analisis laporan keuangan.

Rasio Keuangan

Salah satu alat ukur kinerja adalah analisis rasio keuangan daerah yang merupakan inti pengukuran kinerja sekaligus konsep pengelolaan organisasi pemerintah untuk menjamin diberlakukannya pertanggungjawaban publik oleh lembaga-lembaga pemerintah kepada masyarakat luas. Menurut Mahmudi (2007:96), Adapun jenis rasio keuangan daerah tersebut diantaranya :

1. Rasio Kemandirian Daerah
Rasio kemandirian daerah menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Gambaran kinerja yang baik dilihat dari

rasio kemandirian adalah semakin tinggi rasio kemandirian, maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah tersebut. Hal ini berarti pemerintah daerah telah mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintahan dana pembangunan.

2. Derajat desentralisasi

Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.

3. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Kemampuan memperoleh PAD dikategorikan efektif apabila rasio ini mencapai minimal 1 atau 100%.

4. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD, indikator rasio efektivitas PAD saja belum cukup, sebab meskipun jika dilihat dari rasio efektivitasnya sudah baik tetapi bila ternyata biaya untuk mencapai target

tersebut sangat besar, maka berarti pemungutan PAD tersebut tidak efisien. Oleh karena itu perlu juga dihitung rasio efisiensi PAD. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan PAD dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 100%. Untuk dapat menghitung rasio efisiensi PAD ini diperlukan data tambahan yang tidak tersedia dalam LRA, yaitu data tentang biaya pemungutan PAD.

5. Rasio Efektivitas Pajak Daerah
Rasio ini menunjukkan kemampuan penerimaan daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan.

6. Rasio Efisiensi Pajak Daerah
Sama halnya dengan analisis efisiensi PAD, untuk dapat menghitung rasio efisiensi pajak daerah diperlukan data tentang biaya pemungutan pajak.

7. Rasio Ketergantungan Daerah
Rasio ketergantungan menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Pada rasio ketergantungan daerah kinerja yang baik ditunjukkan dengan semakin rendahnya rasio ketergantungan daerah.

8. Derajat Kontribusi BUMD

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah. Untuk derajat kontribusi BUMD semakin tinggi derajat kontribusi BUMD maka semakin tinggi kontribusi BUMD terhadap total pendapatan daerah.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bidang Keuangan dan Pendapatan dalam lingkungan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2001-2010, dan dokumen – dokumen lain yang dihasilkan oleh bidang Bidang Keuangan dan Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang dilakukan untuk mengetahui dan menjawab serta untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam situasi.

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah Laporan

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Data-data yang telah dikumpulkan akan di analisis dengan menggunakan rasio keuangan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sebelum Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

Sebelum periode anggaran 2004, metode penyusunan anggaran yang digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah metode anggaran tradisional (*line item budgeting*). Untuk periode anggaran tahun 2001 sampai 2003, realisasi pendapatan daerah selalu mengalami peningkatan, mulai dari Rp. 24.495.023.669 di tahun 2001 meningkat menjadi Rp. 170.433.767.531 pada tahun 2002 atau selisih sebesar Rp. 145.938.743.862. Selanjutnya kembali meningkat menjadi sebesar 184.648.385.349. Secara umum hal yang sama terjadi pula pada penerimaan bantuan dari pemerintah pusat yang juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Realisasi bantuan dari pemerintah pusat pada tahun 2001 sebesar Rp. 17.090.393.123. meningkat menjadi Rp. 145.745.066.504 pada tahun 2002, begitu juga untuk tahun 2003 mengalami peningkatan menjadi Rp. 161.561.123.687. Jadi, secara umum total pendapatan daerah selama

kurun waktu periode anggaran 2001 sampai 2003 terus mengalami peningkatan. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap perhitungan rasio kemandirian daerah dan rasio – rasio lainnya. Selanjutnya akan disajikan perhitungan rasio keuangan sebelum penerapan ABK.

Tabel 5.3
Perhitungan Rasio Kemandirian
Periode Anggaran 2001, 2002, dan
2003
(Sebelum penerapan Anggaran
Berbasis Kinerja)

Tahun Anggaran	PAD	Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman	Persentase
2001	7.404.630.546	17.090.393.123	43,32
2002	22.156.644.777	148.277.122.754	14,94
2003	18.144.213.562	166.504.171.687	10,89

Sumber : Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah

Dari Tabel 5.3 dapat diketahui bahwa rasio kemandirian daerah pada periode sebelum penerapan anggaran berbasis kinerja mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yaitu mulai dari tahun 2001 yang menunjukkan angka 43,32%

mengalami penurunan sebesar 28,38 di tahun 2002 sehingga menjadi 14,94% dan menurun lagi menjadi 10,89%.

Tabel 5.4
Perhitungan Rasio Ketergantungan
Daerah
Periode Anggaran 2001, 2002, dan
2003
(Sebelum penerapan Anggaran
Berbasis Kinerja)

Tahun Anggaran	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan Daerah	Persentase
2001	17.090.393.123	24.495.023.669	69,77
2002	148.277.122.754	170.433.767.531	86,99
2003	166.504.171.687	184.648.385.249	90,17

Sumber : Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah

Dari persentase rasio ketergantungan daerah pada Tabel 5.4 dapat diketahui bahwa sebelum penerapan anggaran berbasis kinerja tingkat rasio menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 2001 yang menunjukkan angka 69,77% mengalami peningkatan sebesar 20,22% menjadi 86,99% pada tahun 2002, kemudian mengalami peningkatan lagi pada tahun 2003 sebesar 3,18% menjadi 90,17%.

Tabel 5.5

Perhitungan Derajat Desentralisasi
 Periode Anggaran 2001, 2002, dan
 2003
 (Sebelum penerapan Anggaran
 Berbasis Kinerja)

Tahun Anggaran	PAD	Total Pendapatan Daerah	Persentase
2001	7.404.630.546	24.495.023.669	30,22
2002	22.156.644.777	170.433.767.531	13,00
2003	18.144.213.562	184.648.385.249	9,82

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 5.5 menunjukkan derajat desentralisasi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada periode sebelum penerapan anggaran berbasis kinerja selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 2001 adalah sebesar 30,22% mengalami penurunan sebesar 17,22% menjadi 13% pada tahun 2002, kemudian mengalami penurunan lagi pada tahun 2003 menjadi 9,82%.

Tabel 5.6
 Perhitungan Rasio Efektivitas PAD
 Periode Anggaran 2001, 2002, dan
 2003
 (Sebelum penerapan Anggaran
 Berbasis Kinerja)

Tahun Anggaran	PAD	Target Penerimaan PAD	Persentase
2001	7.404.630.546	4.874.876.000	152
2002	22.156.644.777	9.999.786.387	222
2003	18.144.213.562	16.886.900.343	107

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Efektivitas PAD pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan hasil rasio pada Tabel 5.6 menunjukkan angka naik turun, pada tahun 2001 sebesar 152% mengalami peningkatan sebesar 70% pada tahun 2002 menjadi 222, tetapi pada tahun 2003 mengalami penurunan menjadi 107%.

Tabel 5.7
 Perhitungan Rasio Efisiensi PAD
 Periode Anggaran 2001, 2002, dan
 2003
 (Sebelum penerapan Anggaran
 Berbasis Kinerja)

Tahun	Biaya Pemerol	PAD	Persentase
-------	---------------	-----	------------

Anggaran	Realisasi PAD	Target PAD	Persentase
2001	1.020.300.000	7.404.630.546	13,77
2002	1.575.450.000	22.156.644.777	7,11
2003	1.738.900.000	18.144.213.562	9,58

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dari Tabel 5.7 dapat diketahui bahwa rasio efisiensi PAD pada periode sebelum penerapan anggaran berbasis kinerja mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, yaitu mulai dari tahun 2001 yang menunjukkan angka 13,77% mengalami penurunan pada tahun 2002 sebesar 6,66% sehingga menjadi 7,11%, tetapi pada tahun 2003 mengalami peningkatan sehingga menjadi 9,58%.

Tabel 5.8
Perhitungan Rasio Efektivitas Pajak Daerah
Periode Anggaran 2001, 2002, dan 2003
(Sebelum penerapan Anggaran Berbasis Kinerja)

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	Target Penerimaan Pajak Daerah	Persentase
2001	2.143.368.661	3.037.237.000	71
2002	6.000.970.000	3.504.500.000	171

Tahun	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	Persentase
2003	2.925.8944	0.000.3.106.500.000	123

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dari persentase rasio efektivitas pajak daerah pada Tabel 5.8 dapat diketahui bahwa sebelum penerapan anggaran berbasis kinerja rasio ini menunjukkan angka yang berfluktuasi, yaitu pada tahun 2001 menunjukkan angka 71% mengalami peningkatan pada tahun 2002 menjadi 171%. Pada tahun 2003 mengalami penurunan yang cukup tajam sebesar 48% sehingga menunjukkan angka 123%.

Tabel 5.9
Perhitungan Rasio Efisiensi Pajak Daerah
Periode Anggaran 2001, 2002, dan 2003
(Sebelum penerapan Anggaran Berbasis Kinerja)

Tahun Anggaran	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	Persentase
2001	156.200.550	2.143.368.661	7,28
2002	198.316.000	6.000.972.925	3,30
2003	199.764.300	3.815.978.944	5,28

Sumber : Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah

Dari Tabel 5.9 dapat diketahui bahwa rasio efisiensi PAD pada periode sebelum penerapan anggaran berbasis kinerja mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, yaitu mulai dari tahun 2001 yang menunjukkan angka 7,28% mengalami penurunan pada tahun 2002 sebesar 4,02% menjadi 3,30%, tetapi mengalami peningkatan kembali pada tahun 2003 sehingga menjadi 5,28%.

Tabel 5.10
Perhitungan Derajat Kontribusi
BUMD
Periode Anggaran 2001, 2002, dan
2003
(Sebelum penerapan Anggaran
Berbasis Kinerja)

Tahun Anggaran	Penerimaan Bagian Laba BUMD	PAD	Persentase
2001	380.65 7.876	7.404.63 0.546	5,14
2002	966.45 3.756	22.156.6 44.777	4,36
2003	686.73 0.995	18.144.2 13.562	3,78

Sumber : Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah

Tabel 5.10 menunjukkan derajat kontribusi BUMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada periode

sebelum penerapan anggaran berbasis kinerja mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Derajat kontribusi BUMD pada tahun 2001 sebesar 5,14% mengalami penurunan berturut-turut pada tahun 2002 dan 2003 menjadi sebesar 4,36% dan 3,78%.

Berdasarkan Tabel 5.11 di atas, dapat dilihat pada periode sebelum penerapan anggaran berbasis kinerja tingkat rasio-rasio keuangan umumnya menunjukkan angka yang naik dan turun dari tahun ke tahun, dan hanya rasio ketergantungan daerah yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata 82,31%, Sedangkan rasio-rasio keuangan lainnya menunjukkan angka yang turun yaitu meliputi : rasio kemandirian daerah dengan rata-rata 23,05%, rasio derajat desentralisasi dengan rata-rata 17,68%, rasio kontribusi BUMD dengan rata-rata 4,42%. Sedangkan untuk rasio yang mengalami naik turun meliputi rasio efektivitas PAD dengan rata-rata 160,33%, dan rasio efisiensi PAD dengan rata-rata 10,15%, dan rasio efisiensi pajak daerah dengan rata-rata 5,28%, dan rasio efektivitas pajak daerah dengan rata-rata 121,6%.

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sesudah Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

Tabel 5.12
Perhitungan Rasio Kemandirian
Periode Anggaran 2004 hingga 2010
(Sesudah penerapan Anggaran
Berbasis Kinerja)

Tahun Anggaran	PAD	Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman	Persentase
2004	15.887.942.967	199.435.087.612	7,96
2005	14.186.942.522	240.180.448.750	5,90
2006	18.620.384.174	426.865.116.688	4,36
2007	25.774.302.902	477.743.544.277	5,39
2008	24.430.175.843	469.690.740.711	5,20
2009	23.778.190.528	522.920.519.363	4,54
2010	23.536.947.637	654.876.735.398	3,59

Sumber : Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah

Dari rasio kemandirian daerah pada Tabel 5.12 dapat diketahui bahwa pada periode sesudah penerapan anggaran berbasis kinerja tingkat rasio menunjukkan angka naik turun, yaitu mengalami

penurunan pada tahun dari tahun 2004 hingga 2006, tetapi mengalami peningkatan lagi menjadi 5,39% di tahun 2007 dan Pada tahun 2008 hingga 2010 mengalami penurunan lagi.

Tabel 5.13
Perhitungan Rasio Ketergantungan
Daerah
Periode Anggaran 2004 hingga 2010
(Sesudah penerapan Anggaran
Berbasis Kinerja)

Tahun Anggaran	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan Daerah	Persentase
2004	199.435.087.612	220.767.213.335	90,33
2005	240.180.448.750	261.615.686.272	91,80
2006	426.865.116.688	452.631.108.007	94,30
2007	477.743.544.277	517.385.449.021	92,33
2008	469.690.740.711	524.669.630.727	89,52
2009	522.920.519.363	574.758.328.981	90,98
2010	654.876.735.398	742.343.085.700	88,21

Sumber : Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah

Tabel 5.13 menunjukkan rasio ketergantungan daerah yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Rasio ketergantungan daerah pada tahun 2004 adalah sebesar 90,33%, meningkat di tahun 2005 dan 2006

menjadi 90,33% dan 94,30%, tetapi mengalami penurunan di tahun 2007,2008 dan 2010 menjadi 92,33%, 89,52%, dan 88,21%.

Tabel 5.14

Perhitungan Derajat Desentralisasi Periode Anggaran 2004 hingga 2010 (Sesudah penerapan Anggaran Berbasis Kinerja)

Tahun Anggaran	PAD	Total Pendapatan Daerah	Persentase
2004	15.887.942.967	220.767.213.335	7,19
2005	14.186.942.522	261.615.686.272	5,42
2006	18.620.384.174	452.631.108.007	4,11
2007	25.774.302.902	517.385.449.021	4,98
2008	24.430.175.843	524.669.630.727	4,65
2009	23.778.190.528	574.758.328.981	4,13
2010	23.536.947.637	742.343.085.700	3,17

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 5.14 menunjukkan rasio derajat desentralisasi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada periode sesudah penerapan anggaran berbasis kinerja berfluktuasi dari tahun ke tahun. Derajat desentralisasi pada tahun 2004 adalah sebesar 7,19% mengalami penurunan pada tahun

2005 menjadi 5,42%, ditahun 2006 masih mengalami penurunan menjadi 4,11%, pada tahun 2007 mengalami peningkatan menjadi sebesar 4,98% dan di tahun 2008 hingga 2010 terus mengalami penurunan menjadi sebesar 4,65%, 4,13% dan 3,17%.

Tabel 5.15

Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Periode Anggaran 2004 hingga 2010 (Sesudah penerapan Anggaran Berbasis Kinerja)

Tahun Anggaran	PAD	Target Penerimaan PAD	Persentase
2004	15.887.942.967	17.469.244.472	90,94
2005	14.186.942.522	15.037.123.330	94,36
2006	18.620.384.174	18.325.385.000	101,60
2007	25.774.302.902	14.259.001.250	180,75
2008	24.430.175.843	19.518.165.357	125,16
2009	23.778.190.528	19.688.095.650	120,77
2010	23.536.947.637	20.558.738.000	114,48

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Efektivitas PAD pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Tabel 5.15 menunjukkan angka yang naik turun, yaitu pada tahun 2004 sebesar 90,94%

mengalami peningkatan hingga tahun 2007 menjadi sebesar, 94,36% untuk tahun 2005, 101,60% untuk tahun 2006, dan 180,75% untuk tahun 2007, sedangkan untuk tahun 2008 hingga 2010 mengalami penurunan menjadi sebesar 125,16%, 120,77% pada tahun 2009 dan 114,48 pada tahun 2010.

Tabel 5.16

Perhitungan Rasio Efisiensi PAD
Periode Anggaran 2004 hingga 2010
(Sesudah penerapan Anggaran
Berbasis Kinerja)

Tahun Anggaran	Biaya Pemerolehan PAD	PAD	Persentase
2004	2.055.850.000	15.887.942.967	12,93
2005	2.324.187.000	14.186.942.522	16,38
2006	2.591.378.000	18.620.384.174	13,91
2007	2.913.745.000	25.774.302.902	11,30
2008	3.123.950.000	24.430.175.843	12,78
2009	3.354.456.000	23.778.190.528	14,10
2010	3.795.100.000	23.536.947.637	16,12

Sumber : Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah

Dari Tabel 5.16 dapat diketahui bahwa rasio efisiensi PAD pada periode sesudah penerapan anggaran berbasis kinerja

menunjukkan angka yang naik turun dari tahun ke tahun, yaitu dari tahun 2004 yang menunjukkan angka 12,93%, meningkat pada tahun 2005 menjadi 16,38%, tetapi pada tahun 2006 mengalami penurunan menjadi 13,91% begitu juga untuk tahun 2007 dan 2008 mengalami penurunan menjadi 11,30% dan 12,78%, pada tahun 2009 dan 2010 kembali mengalami peningkatan menjadi 14,10% dan 16,12%.

Tabel 5.17

Perhitungan Rasio Efektivitas Pajak
Daerah
Periode Anggaran 2004 hingga 2010
(Sesudah penerapan Anggaran
Berbasis Kinerja)

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	Target Penerimaan Pajak Daerah	Persentase
2004	4.166.340.194	3.737.500.000	111,47
2005	2.408.342.398	4.178.500.000	57,63
2006	2.264.176.131	4.029.855.000	56,18
2007	2.917.139.833	4.332.376.350	67,33
2008	3.786.439.445	2.437.810.750	155,32
2009	3.164.241.626	2.544.083.750	124,37
2010	3.167.581.129	2.296.083.000	137,95

Sumber : Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah

Dari persentase rasio efektivitas pajak daerah pada Tabel 5.17 dapat diketahui bahwa sesudah penerapan anggaran berbasis kinerja, rasio menunjukkan angka yang berfluktuasi, yaitu pada tahun 2004 menunjukkan angka 111,47% mengalami penurunan hingga tahun 2006 yaitu menjadi sebesar 57,63% pada tahun 2005 dan 56,18% pada tahun 2006, pada tahun 2007 dan 2008 mengalami peningkatan menjadi sebesar 67,33% pada tahun 2007 dan 155,32% pada tahun 2008, tetapi pada tahun 2009 mengalami penurunan lagi menjadi sebesar 124,37% dan pada tahun 2010 mengalami peningkatan menjadi sebesar 137,95%.

Tabel 5.18
Perhitungan Rasio Efisiensi Pajak
Daerah
Periode Anggaran 2004 hingga 2010
(Sesudah penerapan Anggaran
Berbasis Kinerja)

Tahun Anggaran	Biaya Pemerolehan Pajak Daerah	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	Persentase
2004	203.476.700	4.166.340.194	4,88
2005	206.986.350	2.408.342.398	8,59

2006	210.751.500	2.264.176.131	9,30
2007	213.880.000	2.917.139.833	7,33
2008	215.110.950	3.786.439.445	5,68
2009	217.341.400	3.164.241.626	6,86
2010	221.496.100	3.167.581.129	6,99

Sumber : Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah

Dari Tabel 5.18 dapat diketahui bahwa rasio efisiensi PAD pada periode sesudah penerapan anggaran berbasis kinerja menunjukkan angka yang naik turun dari tahun ke tahun, yaitu mulai dari tahun 2004 yang menunjukkan angka 4,88% meningkat pada tahun 2005 dan 2006 menjadi 8,59% dan 9,30%, sedangkan untuk tahun 2007 dan 2008 kembali mengalami penurunan menjadi 7,33% dan 5,68% pada tahun 2009 dan 2010 rasio efisiensi Pajak Daerah kembali mengalami peningkatan menjadi 6,86% dan 6,99%.

Tabel 5.19
Perhitungan Derajat Kontribusi
BUMD
Periode Anggaran 2004 hingga 2010
(Sesudah penerapan Anggaran
Berbasis Kinerja)

Tahun Anggaran	Penerimaan Bagian Laba BUMD	PAD	Persentase
2004	6.565.268.682	15.887.942.967	41,32
2005	8.296.102.102	14.186.942.522	58,47
2006	12.808.506.047	18.620.384.174	68,78
2007	19.005.347.007	25.774.302.902	73,73
2008	15.712.095.637	24.430.175.843	64,31
2009	14.124.406.940	23.778.190.528	59,40
2010	14.019.763.978	23.536.947.637	59,56

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 5.19 menunjukkan derajat kontribusi BUMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada periode sesudah penerapan anggaran berbasis kinerja berfluktuasi dari tahun ke tahun. Derajat kontribusi BUMD pada tahun 2004 adalah sebesar 41,32% mengalami peningkatan hingga tahun 2007 menjadi sebesar 58,47% pada tahun 2005, 68,78%

pada tahun 2006 dan 73,73% pada tahun 2007, tetapi untuk tahun 2008 hingga tahun 2010 mengalami penurunan yaitu 64,31% pada tahun 2008, 59,40% pada tahun 2009 dan 59,56% pada tahun 2010.

Perbedaan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sebelum dan Sesudah Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

1. Rasio Kemandirian

Hasil perhitungan rasio kemandirian sebelum dan sesudah penerapan ABK adalah sebesar 23,05% dan 5,27%. Rasio ini sesudah penerapan ABK mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar 17,78% sehingga menjadi sebesar 5,27%. Dari angka rasio tersebut dapat menunjukkan bahwa tingkat kemandirian pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tergolong masih rendah yang artinya kemandirian pemerintah daerah dalam mencukupi biaya untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik masih sangat rendah. Secara teoritis pengukuran kemandirian daerah diukur dari pendapatan asli daerah dan setelah diterapkan ABK. Pendapatan asli daerah pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berfluktuasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum mampu

mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerahnya.

2. Rasio Ketergantungan Daerah

Untuk rasio ketergantungan daerah, hasil perhitungan sebelum penerapan anggaran berbasis kinerja adalah sebesar 82,31%. Hal ini berarti bahwa tingkat ketergantungan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih tinggi terhadap pemerintah pusat/provinsi. Begitu juga setelah penerapan anggaran berbasis kinerja rasio ini justru mengalami peningkatan yaitu menjadi sebesar 182,13%. Jadi, dengan penerapan anggaran berbasis kinerja tidak merubah angka rasio ketergantungan daerah menjadi lebih rendah. Dalam perkembangan APBD selama periode 2001 hingga 2010, pendapatan transfer meberikan kontribusi yang terus meningkat terhadap total pendapatan daerah, hal ini menyebabkan semakin meningkatnya ketergantungan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap pemerintah pusat/provinsi, dan mencerminkan bahwa dalam pembiayaan administrasi pemerintah dan pembangunan yang terakomodasi dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama periode 2001 hingga 2010 secara rata-rata diperoleh dari pemerintah pusat.

3. Derajat Desentralisasi

Hasil perhitungan derajat desentralisasi pada periode sebelum penerapan anggaran berbasis kinerja adalah sebesar 17,68% dan sesudah

penerapan anggaran berbasis kinerja mengalami penurunan menjadi 4,80%. Menurunnya rasio derajat desentralisasi yang terjadi pada periode sesudah penerapan anggaran berbasis kinerja menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum mampu memaksimalkan kewenangan dan tanggung jawab terhadap sumber-sumber penerimaan Negara yang dilimpahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

4. Rasio Efektivitas PAD

Hasil perhitungan rasio efektivitas PAD sebelum dan sesudah penerapan anggaran berbasis kinerja sebesar 160,33% dan 118,29%. Angka tersebut menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PAD setelah penerapan anggaran berbasis kinerja malah menurun di bandingkan dengan sebelum penerapan anggaran berbasis kinerja. Hal ini berarti pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam memobilisasi penerimaan PAD belum sesuai dengan yang ditargetkan semakin menurun setelah pemberlakuan penerapan anggaran berbasis kinerja. Penurunan ini disebabkan oleh semakin menurunnya realisasi penerimaan PAD khususnya kurun waktu 2007 hingga 2010, penurunan ini merupakan bentuk ketidakseriusan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka mendongkrak penerimaan PAD. Usaha yang

dilaksanakan ini juga tidak didukung dengan kerja keras secara terpadu dari satuan kerja perangkat daerah yang dibebankan tugas memungut PAD baik yang dilaksanakan dengan program intensifikasi maupun ekstensifikasi.

5. Rasio Efisiensi PAD

Untuk rasio efisiensi PAD hasil perhitungan sebelum dan sesudah penerapan anggaran berbasis kinerja adalah sebesar 10,15% dan 13,93%. Angka ini menunjukkan bahwa rasio efisiensi PAD cenderung meningkat setelah diberlakukan anggaran berbasis kinerja. Peningkatan ini berarti dengan mengeluarkan biaya yang relatif besar, pemerintah daerah belum mampu menghasilkan *output* yang optimal. Dengan demikian, kinerja pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam memungut PAD semakin menurun dalam efisiensi pendapatan asli daerah.

6. Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Hasil perhitungan rasio efektivitas pajak daerah sebelum dan sesudah penerapan anggaran berbasis kinerja adalah sebesar 121,6% dan 101,46%. Angka yang dihasilkan tersebut merupakan angka yang sangat baik karena mencapai lebih dari 100% dan menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan tetapi setelah

penerapan anggaran berbasis kinerja malah menjadi menurun. Penurunannya disebabkan oleh semakin menurunnya realisasi pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun ke tahun. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam mendukung terwujudnya intensifikasi pajak dan retribusi daerah, diantaranya melakukan pendaftaran kembali subyek dan obyek pajak, penetapan dan penyuluhan pajak atau retribusi, melakukan koordinasi dan pengawasan atas kerja penagihan pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah lainnya, pemantauan, evaluasi dan mengkaji ulang terhadap kelayakan tarif pajak dan retribusi dengan kondisi sekarang, serta memberikan teguran dan sanksi terhadap wajib pajak dan retribusi yang menunggak. Disamping upaya diatas program ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dilakukan melalui kegiatan yang berupa penggalan terhadap sumber pungutan baru yang masih belum terjangkau dan mampu memberikan peluang kontribusi terhadap penerimaan daerah.

7. Rasio Efisiensi Pajak Daerah

Rasio ini menghasilkan angka 5,28% pada periode sebelum penerapan anggaran berbasis kinerja dan 7,09% untuk periode setelah penerapan anggaran berbasis kinerja. Sama halnya dengan rasio efisiensi PAD, peningkatan ini menggambarkan bahwa kinerja yang semakin menurun di tunjukkan

pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka pemungutan pajak daerah. Pemerintah daerah belum mampu meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan untuk memungut pajak daerah dan belum mampu merealisasikan penerimaan pajak daerah dengan optimal, dengan demikian kinerja pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dinilai belum semakin membaik dalam hal efisiensi pajak daerah.

8. Rasio Derajat Kontribusi BUMD

Hasil perhitungan rasio derajat kontribusi BUMD sebelum penerapan anggaran berbasis kinerja adalah sebesar 4,42% dan mengalami peningkatan setelah penerapan anggaran berbasis kinerja menjadi 60,97%. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya tingkat kontribusi perusahaan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mendukung pendapatan daerah. Semakin meningkatnya kontribusi BUMD sesudah penerapan anggaran berbasis kinerja di sebabkan semakin meningkatnya kinerja lembaga keuangan bank daerah dan perusahaan daerah serta penyertaan modal kepada pihak ke III PT. Lontar Papyrus dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan.

Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah, harus dicermati dari hasil perhitungan setiap rasio diatas. Hasil

perhitungan menunjukkan bahwa dengan menerapkan anggaran berbasis kinerja, rasio kemandirian daerah, rasio kontribusi BUMD cenderung mengalami peningkatan, sedangkan untuk rasio kemandirian daerah, derajat desentralisasi, efektivitas PAD, efktivitas pajak daerah cenderung semakin menurun.

Simpulan

Berdasarkan hasil perhitungan rasio keuangan keuangan pada pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2001 hingga 2010, dapat disimpulkan bahwa :

1. Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebelum penerapan anggaran berbasis kinerja cukup baik, itu dapat dilihat dari rata-rata rasio kemandirian daerah, rasio desentralisasi, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio efektivitas pajak daerah, yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
2. Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesudah penerapan anggaran berbasis kinerja cenderung menurun dibandingkan dengan sebelum penerapan anggaran berbasis kinerja, hal ini dapat dilihat dari rata-rata rasio kemandirian daerah, derajat desentralisasi, rasio

efektivitas pendapatan asli daerah, rasio efisiensi pendapatan asli daerah, rasio efektivitas pajak daerah, dan rasio efisiensi pajak daerah yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

3. Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebelum penerapan anggaran berbasis kinerja lebih baik dibandingkan dengan setelah penerapan anggaran berbasis kinerja, hal ini dapat dilihat dari rangkuman perhitungan rasio keuangan antara sebelum dan sesudah penerapan anggaran berbasis kinerja, dari rata-rata rasio keuangan tersebut tergambar dengan jelas bahwa rasio-rasio yang ada dalam rasio keuangan, pada periode sebelum penerapan anggaran berbasis kinerja lebih baik di bandingkan sesudah penerapan anggaran berbasis kinerja.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, adapun saran yang diajukan penulis adalah perlu diberlakukannya pengoptimalan sumber pendapatan asli daerah untuk mengurangi tingkat ketergantungan keuangan daerah dari pemerintah pusat melalui peningkatan pengelolaan sumber daya alam, pariwisata, dan

intensifikasi dan ekstensifikasi sumber penerimaan daerah. Secara intensifikasi dan penyempurnaan sistem pelayanan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan penerimaan daerah, meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara unit satuan kerja terkait, dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah, sedangkan secara ekstensifikasi, pemerrintah daerah seharusnya dapat mengidentifikasi potensi daerah dan mengkaji jenis penerimaan daerah yang sudah tidak layak lagi sehingga peluang-peluang baru untuk sumber penerimaan daerah dapat diganti.

Daftar Pustaka

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Erlangga: Jakarta.
- Ekawarna, Shinta Unjaswati. 2008. *Pengukuran Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi*. Skripsi. Universitas Jambi.
- Halim, Abdul dan Theresia Damayanti. 2007. *Seni Bunga Rumpai Manajemen Keuangan Daerah*.: UPP AMP YKPN: Jakarta.
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi*

- Keuangan Daerah.* : Salemba Empat: Jakarta.
- Hartono, Jogiyanto. 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis : Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman.* BPFE UGM: Yogyakarta.
- Herianto, Tedi. 2002. *Metode Penelitian Bisnis.* Erlangga: Jakarta.
- Ihyaul, ulum. 2009. *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar.* Bumi Aksara: Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi.* Erlangga: Jakarta.
- Lubis, Hijrani Putri. 2009. Analisis Pengaruh Pemberlakuan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang. Skripsi. Universitas Sumatra Utara.
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik.* ANDI: Yogyakarta.
- Munandar. 1985. *Akuntansi Anggaran.* alfabeta: Bandung.
- Nordiawan, Deddi dkk. 2007. *Akuntansi Pemerintah.* Salemba Empat: Jakarta.
- Perda Bupati Tanjabbar. No. 4. 2006. *Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.* Kuala Tungkal.
- Perda Bupati Tanjabbar. No. 13. 2008. *Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.* Kuala Tungkal.
- Perda Bupati Tanjabbar. No. 15. 2008. *Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.* Kuala Tungkal.
- Presiden RI. 2000. *PP No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.* Jakarta.
http://www.esdm.go.id/regulasi/pp/cat_view/64-regulasi/74-peraturan-pemerintah/197-tahun-2000.html
- Presiden RI. 2002. *Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Aangarn Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan PERhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.* Jakarta.
www.usdrp-indonesia.org/files/downloadContent/420.pdf

- Presiden RI. 2003. *Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta
[http://www.dmo.or.id/dmo/data/4Peraturan dan Ketetapan/1Undang undang/UU 17 2003 KeuanganNe gara.pdf](http://www.dmo.or.id/dmo/data/4Peraturan%20dan%20Ketetapan/1Undang%20undang/UU%2017%202003%20Keuangan%20Negara.pdf)
- Presiden RI.2004. *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta.
[http://www.bpkp.kpu.go.id/dmdocuments/UU 32 2004](http://www.bpkp.kpu.go.id/dmdocuments/UU_32_2004)
 Pemerintah%20Daerah.pdf
- Presiden RI.2004. *Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta
<http://www.bpkp.kpu.go.id/unit/hukum/uu/2004/33-04.pfd>
- Presiden RI. 2005. *PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
www.bpkp.do.id/unit/hukum/pp/2005/058-05.pdf
- Presiden RI. 2006. *Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
[http://www.jakarta.go.id/v70/direktorhukum/public/download/permendagri 13 2006.pdf](http://www.jakarta.go.id/v70/direktorhukum/public/download/permendagri_13_2006.pdf)
- Santoso, Gempur. 2005. *Metodelogi Penelitian*. Prestasi Pustaka: Jakarta.
- SR, Hasibuan. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Prestasi Pustaka: Jakarta..
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta: Bandung.
- Suprpto, Tri. 2006. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam Masa Otonomi Daerah Tahun 2000-2004. Skripsi: Universitas Islam Indonesia.
- Supriyanto, Y. 1985. *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan daerah*. Erlangga: Jakarta.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2008. *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Alfabeta: Bandung.
- Widodo, T. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif*. LPP UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS: Surakarta.
- Akkermans, H. and Helden, K. V., “Vicious and virtuous cycles in ERP implementation: a case study of interrelations between critical success factors”. *European Journal of Information Systems*, Page 35–46, 2002.
- Bharadwaj, A., Sambamurthy, V., and Zmud, R. W., “IT Capabilities: Theoretical Perspectives and Empirical Operationalization,” in *Proceedings of the 19th*

- International Conference on Information Systems, J. I. DeGross, R. Hirschheim, and M. Newman (eds.), Helsinki, Finland, December 13-16, pp. 378-385. 1998.
- Clark, C. E., Cavanaugh, N. C., Brown, C. V., and Sambamurthy, V., "Building Change-Readiness Capabilities in the IS Organization: Insights From the Bell Atlantic Experience", MIS Quarterly (21:4), pp. 425-455. 1997.
- Dantes, G.R. and Hasibuan, Z.A., "The Impact of Enterprise Resource Planning (ERP) System Implementation on Organization: Case Study ERP Implementation in Indonesia". IBIMA Business Review. Vol. 2011, Article ID 210664, 10 Pages, 2011.
- Daud, R. dan Windana, V., *Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan dan Penerimaan Kas Berbasis Komputer Pada Perusahaan Kecil*. Jurnal Manajemen dan Bisnis, 2014.
- E. Folmer and J. Verhoosel, "State of the Art on Semantic IS Standardization, Interoperability & Quality." TNO, University of Twente, NOiV, CTIT, 03/2011.
- Garg, P. and Garg, A., "An empirical study on critical failure factors for enterprise resource planning implementation in Indian retail sector". Business Process Management Journal, Vol. 19 No. 3, pp. 496-514, 2013.
- Hall, J.A. 2011, "Introduction to Accounting Information Systems". Seventh Edition. Canada. Cengage Learning.
- Hitt, L.M., Wu, D.J. and Zhou, X., "Investment in Enterprise Resource Planning: Business Impact and Productivity Measures". Journal of Management Information Systems, Vol. 19, No. 1, pp. 71-98, 2002.
- Ibrahim, A. dan Lestari, E., "Pengembangan Model Sistem Informasi Integrated Laboratory pada Perguruan Tinggi". Jurnal Sistem Informasi Manajemen. 2011.
- J. Lee, K. Siau, and S. Hong, "Enterprise integration with ERP and EAI," Commun. ACM, vol. 46, no. 2, pp. 54-60, Feb. 2003.
- Jogianto HM. 2009, "Sistem Teknologi Informasi". Edisi III. Yogyakarta: Andi.
- Lucas Jr., H. C., and Olson, M., "The Impact of Information Technology on Organizational Flexibility," Journal of Organizational Computing & Electronic Commerce (4:2), pp. 155-176. 1994.

- Moleong, L.J. 2014, ” *Metodologi Penelitian Kualitatif*”. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moohebat, M.R., Jazi, M.D., and Asemi, A., “*Evaluation of the ERP Implementation at Esfahan Steel Company Based on Five Critical Success Factors: A Case Study*”. *International Journal of Business and Management* Vol. 6, No. 5, May 2011.
- M. Themistocleous and Z. Irani, “*Benchmarking the benefits and barriers of application integration*,” *Benchmarking: An International Journal*, vol. 8, no. 4, pp. 317-331, 2001.
- Otieno, J.O., “*Enterprise Resource Planning (ERP) Systems Implementation Challenges: A Kenyan Case Study*”. BIS 2008, LNBIP 7, pp. 399- 409. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008.
- Ragowsky, A. and Somers, T.M., “*Special Section: Enterprise Resource Planning*”. *Journal of Management Information Systems*, Vol. 19, No. 1, pp. 11-15, 2002.
- R. Gleghorn, “*Enterprise application integration: a manager’s perspective*,” *IT professional*, no. December, pp. 17–23, 2005.
- Romney, M.B. dan Steinbart, P. J., 2013, “*Sistem Informasi Akuntansi*”. Jakarta: Salemba Empat.
- Roth, M. A., Wolfson, D. C., Kleewein, J. C., & Nelin, C. J. (2002). “*Information Integration : A new generation of information technology*”. *ProQuest*, 2.
- Sambamurthy, V., and Zmud, R. W., “*At the Heart of Success: Organization-wide Management Competencies*,” in *Steps to the Future: Fresh Thinking on the management of IT-Based Organizational transformation*, C. Sauer and P.Yetton (eds.), San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers, pp. 143-164. 1997.
- Shang, S. and Seddon, P.B., “*Assesing and Managing The Benefits of Enterprise Systems: The Business Manager’s Perspective*”. *Information Systems Journal*, Vol. 12, pp. 271-299, 2002.
- Sugiyono. 2013,” *Metode Penelitian Kombinasi*”. Cetakan 4. Bandung. Alfabeta.
- Umar, H., 2005, “*Metode Penelitian*”. Jakarta : Salemba Empat.
- Weygandt, J.J., Kieso, D.E. and Kimmel, P.D. 2007, “*Accounting Principles Pengantar Akuntansi*”. Edisi Ketujuh. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

Widiyanti, S., "*Kesuksesan dan Kegagalan Implementasi ERP pada Perusahaan*". Tugas Akhir Sistem Informasi Manajemen. 2013.

Yin, R.K., 2013, "*Studi Kasus Desain dan Metode*". Cetakan 13. Jakarta: Raja Grafindo Persada.